ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN POLITIK TIGA SERANGKAI DALAM INDISCHE PARTIJ TERHADAP PERKEMBANGAN NASIONALISME DI INDONESIA TAHUN 1912-1913

Afifah Ramadhini[1], Putri Natasya Addiva[2], Raidatul Mahdiya Edma[3], Shalma Andini[4], Zaskia Mahendra[5],Rahmuliani Fithriah[6]

[1,2,3,4,5,6]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : afifahramadhini3@gmail.com[1], putrinatasyaadiva01@gmail.com[2], raidatulmahdiyaedma@gmail.com[3], shalmaandini53@gmail.com[4], zaskiamahendra2323@gmail.com[5], rahmuliani@fis.unp.ac.id[6]

ABSTRACT

This study examines the founding of the Indische Partij and the political thought of three figures: Ernest Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, and Tjipto Mangoenkoesoemo, in response to Dutch colonialism in the early 20th century in the Dutch East Indies. Through a historical approach, including a literature review and analysis of primary and secondary sources, this study reveals that the Indische Partij was formed as a reaction to the injustices that occurred during the colonial era. These three figures opposed racial discrimination, supported open nationalism, and utilized the media as a tool for their political struggle. Each figure had a distinct approach to their thinking. Overall, the political thought of the Tiga Serangkai (Three Musketeers) made a significant contribution to the development of Indonesian nationalism and the struggle for independence.

Keywords : *Indische Partij, Tiga Serangkai, Nationalism, Colonialism, Political Thought.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pendirian Indische Partij serta pemikiran politik dari tiga tokoh, yaitu Ernest Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Tjipto Mangoenkoesoemo, dalam menanggapi kolonialisme Belanda pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda. Melalui pendekatan historis dengan melakukan kajian pustaka dan analisis terhadap sumber primer dan sekunder, penelitian ini mengungkap bahwa Indische Partij terbentuk sebagai reaksi terhadap ketidakadilan yang terjadi di era kolonial. Ketiga tokoh tersebut menentang praktik diskriminasi rasial, mendukung nasionalisme yang terbuka, serta memanfaatkan media sebagai alat untuk perjuangan politik mereka. Setiap tokoh memiliki pendekatan pemikiran yang berbeda. Secara keseluruhan, pemikiran politik Tiga Serangkai memiliki kontribusi yang signifikan dalam perkembangan nasionalisme Indonesia serta perjuangan menuju kemerdekaan.

Kata Kunci : *Indische Partij, Tiga Serangkai, Nasionalisme, Kolonialisme, Pemikiran Politik.*

PENDAHULUAN

Kolonialisme Belanda di Hindia Belanda tidak hanya mengakibatkan eksploitasi ekonomi, tetapi juga membangun sebuah sistem diskriminasi sosial yang mendalam dan menghalangi hak-hak masyarakat lokal dalam berbagai aspek kehidupan. Pembagian masyarakat berdasarkan ras yang memisahkan antara golongan Eropa, Timur Asing, dan pribumi menyebabkan ketidakadilan yang luas di bidang pendidikan, hukum, politik, dan ekonomi. Situasi ini akhirnya mendorong lahirnya kesadaran nasional yang memicu pembentukan gerakan perlawanan terorganisir terhadap pemerintahan kolonial.

Salah satu wujud yang paling penting dari kesadaran nasional tersebut merupakan pendirian Indische Partij pada 25 Desember 1912 di Bandung. Organisasi ini menjadi partai politik pertama di Hindia Belanda yang secara tegas berjuang untuk kemerdekaan, membedakannya dari gerakan lainnya yang masih berfokus pada aspek kultural atau kepentingan kelompok tertentu. Di belakang pendirian Indische Partij terdapat tiga tokoh yang dikenal sebagai Tiga Serangkai, yaitu Ernest Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Tjipto Mangoenkoesoemo. Ketiga individu ini memainkan peranan penting dalam menyebarkan ide nasionalisme modern yang inklusif, melampaui batasan etnis, agama, dan golongan sosial.

Pemikiran politik dari Tiga Serangkai memiliki dampak besar dalam perkembangan kesadaran nasional di Indonesia. Melalui sejumlah tulisan kritis di berbagai media seperti De Expres, Het Tijdschrift, dan Oetoesan Hindia, mereka tidak hanya mengecam kebijakan kolonial, tetapi juga aktif membangun narasi kebangsaan yang menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri bagi seluruh rakyat Hindia. Karya-karya seperti Als Ik Eens Nederlander Was yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara merupakan bukti bagaimana tulisan dapat menjadi alat perlawanan yang efektif melawan kekuasaan kolonial.

Walaupun ketiga tokoh ini memiliki tujuan bersama mengenai kemerdekaan Hindia, setiap individu memiliki ciri pemikiran yang berbeda. Douwes Dekker dikenal karena nasionalisme yang ekstrem dan sekuler, Tjipto Mangoenkoesoemo memiliki pandangan evolusi yang mencoba menggabungkan unsur-unsur Barat dan Timur, sementara Soewardi Suryaningrat menonjolkan pendekatan kultural-jurnalistik yang dapat menyentuh kesadaran masyarakat secara luas. Persamaan dan perbedaan dari pemikiran ketiga tokoh ini menarik untuk diteliti lebih lanjut agar bisa memahami kerumitan ideologi nasionalisme awal di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif, yang bertujuan untuk mendalami fenomena sosial dan perilaku manusia dengan lebih detail, berfokus pada arti, pengalaman, serta konteks sosial yang mendasari suatu kejadian. Metode kualitatif mengutamakan data deskriptif berupa teks, arsip, dan kajian pustaka, sehingga peneliti dapat memahami bagaimana dan alasan di balik terjadinya suatu fenomena (Nurhayati et al., 2024, hlm. 24–30). Pendekatan ini bersifat adaptif dan mampu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai pengalaman individu maupun kelompok di dalam konteks sosial dan budaya.

Pendekatan kualitatif dipilih karena pemikiran politik Tiga Serangkai tidak dapat dipahami secara penuh hanya melalui angka statistik, tetapi memerlukan analisis menyeluruh tentang konteks sosial, ideologi, dan latar belakang historis yang mengelilinginya. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian berusaha untuk mengungkap bagaimana faktor-faktor internal seperti

pandangan politik, latar belakang sosial, serta keyakinan masing-masing tokoh, yaitu Ernest Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Tjipto Mangoenkoesoemo, membentuk karakter nasionalisme yang mereka perjuangkan lewat Indische Partij.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber sekunder. Menurut Herlina, sumber sekunder merujuk pada sumber yang penulisnya tidak terlibat langsung dalam peristiwa tertentu, melainkan hanya menerima informasi dari pihak lain. Sumber sekunder juga mencakup informasi yang telah diproses sebelumnya, seperti buku, artikel, dan penelitian sejarah lainnya (Herlina, 2020: 26–27). Sumber-sumber yang digunakan termasuk buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang menjelaskan mengenai sejarah pergerakan nasional Indonesia, Indische Partij, serta pemikiran tokoh-tokoh Tiga Serangkai, seperti Sejarah Nasional Indonesia yang ditulis oleh Poesponegoro dan Notosusanto, berbagai artikel jurnal dari universitas yang ada di Indonesia, serta kajian sejarah lain yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Munculnya Indische partij

Lahirnya Indische Partij tidak dapat dipisahkan dari kondisi masyarakat Hindia Belanda pada awal abad ke-20 yang mengalami berbagai bentuk ketidakadilan akibat sistem kolonial Belanda. Pemerintah kolonial menerapkan sistem penggolongan masyarakat berdasarkan ras dan kedudukan sosial yang membagi masyarakat menjadi golongan Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Dalam sistem tersebut, kaum Eropa memperoleh hak-hak istimewa dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, dan hukum, sedangkan masyarakat pribumi serta Indo-Eropa sering mengalami diskriminasi dan keterbatasan hak. Ketimpangan sosial tersebut menimbulkan rasa kecewa dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Hindia Belanda. Dari keadaan inilah mulai tumbuh kesadaran nasional dan semangat perjuangan untuk memperoleh persamaan hak, kebebasan, serta kemerdekaan dari penjajahan Belanda (Firmansyah, 2013: 57).

Tokoh yang paling aktif menyuarakan penolakan terhadap diskriminasi kolonial adalah E.F.E. Douwes Dekker. Ia dikenal sebagai tokoh yang berani mengkritik kebijakan pemerintah kolonial melalui berbagai tulisan di surat kabar Het Tijdschrift dan De Express. Dalam tulisannya, Douwes Dekker mengajak seluruh rakyat Hindia Belanda untuk bersatu melawan penindasan dan ketidakadilan yang dilakukan pemerintah kolonial. Menurut pandangannya, kaum pribumi dan Indo memiliki nasib yang sama karena sama-sama menjadi korban eksploitasi kolonial Belanda. Oleh sebab itu, ia berpendapat bahwa perjuangan harus dilakukan melalui organisasi politik modern yang mampu mewakili kepentingan seluruh rakyat Hindia Belanda tanpa membedakan ras maupun golongan. Pemikiran Douwes Dekker kemudian mendapat dukungan luas dari masyarakat karena dianggap mampu membangkitkan semangat nasionalisme dan persatuan bangsa (Nurhasanah dkk., 2025: 4625).

Gagasan untuk membentuk organisasi politik semakin berkembang melalui berbagai pertemuan politik yang berlangsung pada tahun 1911–1912. Dalam rapat De Indische Bond di Jakarta, Douwes Dekker menegaskan pentingnya perjuangan politik demi masa depan rakyat Hindia Belanda. Ia menyampaikan bahwa rakyat tidak boleh terus-menerus hidup di bawah penindasan kolonial dan harus mulai memperjuangkan hak-haknya secara terorganisasi. Selanjutnya, pada rapat tanggal 25 Agustus 1912 dibahas secara lebih serius mengenai perlunya pembentukan organisasi politik yang dapat memperjuangkan kepentingan rakyat Hindia. Dari hasil pertemuan tersebut dibentuk sebuah panitia yang bertugas mempersiapkan organisasi baru

yang kemudian berkembang menjadi Indische Partij. Organisasi ini diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan politik yang menyatukan seluruh rakyat Hindia Belanda dalam melawan penjajahan (Perdana & Pratama, 2022: 45).

Selain menyebarkan gagasan melalui tulisan dan pidato politik, Douwes Dekker juga melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk memperoleh dukungan masyarakat. Dalam perjuangannya, ia bekerja sama dengan Tjipto Mangunkusumo dan Ki Hadjar Dewantara yang kemudian dikenal sebagai Tiga Serangkai. Ketiga tokoh tersebut memiliki peran penting dalam membangkitkan kesadaran nasional rakyat Indonesia melalui kegiatan politik, pendidikan, dan propaganda. Dukungan masyarakat terhadap gerakan ini terus meningkat sehingga Indische Partij berhasil memiliki banyak anggota dan cabang di berbagai wilayah Hindia Belanda. Kehadiran organisasi ini menjadi bukti bahwa kesadaran nasional masyarakat mulai tumbuh dan berkembang secara lebih luas (Poesponegoro & Notosusanto, 2019: 112).

Pada akhirnya, Indische Partij resmi didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung. Organisasi ini menjadi partai politik pertama di Hindia Belanda yang secara terbuka memperjuangkan nasionalisme dan kemerdekaan. Melalui slogan Indie los van Holland yang berarti "Hindia lepas dari Belanda" dan Indie voor Indiers yang berarti "Hindia untuk orang Hindia," Indische Partij menegaskan cita-citanya untuk membebaskan Hindia Belanda dari penjajahan serta membangun persatuan seluruh rakyat tanpa membedakan ras, agama, maupun golongan. Organisasi ini juga berusaha menanamkan rasa kebangsaan dan persatuan di kalangan rakyat agar mampu melawan kekuasaan kolonial secara bersama-sama. Namun, perjuangan Indische Partij mendapat penolakan keras dari pemerintah kolonial Belanda karena dianggap membahayakan kekuasaan kolonial. Akibatnya, permohonan badan hukum organisasi tersebut ditolak pada tahun 1913. Meskipun demikian, penolakan tersebut justru semakin memperkuat semangat perjuangan Tiga Serangkai dan menjadikan mereka tokoh penting dalam perkembangan nasionalisme Indonesia (Nurhasanah dkk., 2025: 4628).

Munculnya Pemikiran Politik Tiga Serangkai

1) Ernest Douwes Dekker

Ernest Douwes Dekker mengembangkan gagasan Nasionalisme Indiër, yaitu paham kebangsaan yang menekankan persatuan seluruh penduduk Hindia tanpa membedakan suku, ras, agama, maupun golongan sosial. Menurutnya, identitas bersama harus dibangun berdasarkan status sebagai warga Hindia, bukan berdasarkan perbedaan etnis tertentu. Ia bercita-cita membentuk Hindia baru yang dipimpin oleh rakyatnya sendiri, bukan oleh bangsa asing atau penjajah. Douwes Dekker juga menghendaki agar golongan Indo melebur dengan pribumi karena jumlah kaum Indo sangat sedikit dan tidak akan mampu melawan Belanda apabila bergerak sendiri. Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa perjuangan melawan kolonialisme harus dilakukan bersama seluruh rakyat Indonesia melalui persatuan dan pembentukan organisasi politik yang bersifat inklusif (Latief, 2012).

Untuk menyebarkan gagasannya, Ernest Douwes Dekker aktif menulis artikel-artikel kritis di berbagai surat kabar seperti De Locomotief, Soerabaiasch Handelsblad, dan Bataviaasch Nieuwsblad. Dalam tulisannya yang berjudul Het bankroet der ethische principles in Nederlandsch Oost-Indie, ia mengkritik Politik Etis Belanda yang dianggap hanya menjadi bentuk kemunafikan kolonial dan tidak benar-benar menyejahterakan rakyat pribumi. Beberapa bulan kemudian, ia kembali menulis artikel Hoe kan Holland het spoedigst zijn koloniën verliezen? yang menegaskan bahwa kemerdekaan Hindia dari penjajahan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Selain itu, ia juga mendirikan majalah Het Tijdschrift dan surat kabar De Expres sebagai sarana untuk

menyebarkan semangat nasionalisme dan menentang kolonialisme Belanda. Melalui tulisan-tulisan tersebut, Douwes Dekker menyampaikan propaganda mengenai pentingnya persatuan seluruh rakyat Hindia untuk menghapus hubungan kolonial dan menghadapi ancaman eksploitasi Belanda secara bersama-sama (Pamungkas, 2025).

Tidak hanya melalui tulisan, Ernest Douwes Dekker juga memperjuangkan gagasannya melalui organisasi politik bersama Tjipto Mangoenkoesoemo dan Ki Hadjar Dewantara yang dikenal sebagai Tiga Serangkai. Mereka mendirikan Indische Partij pada tahun 1912 sebagai organisasi politik modern yang terbuka bagi semua golongan tanpa membedakan keturunan, agama, maupun budaya. Tujuan utama organisasi ini adalah memperjuangkan "Indie Merdeka" dengan semboyan "Indie untuk Indier," yaitu Hindia yang diperintah dan dimiliki oleh rakyat Hindia sendiri. Indische Partij berusaha menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan nasional, serta menyatukan seluruh masyarakat Hindia, baik pribumi, Indo, Cina, Arab, maupun golongan lainnya untuk bersama-sama melawan penjajahan Belanda. Selain mendirikan partai, Tiga Serangkai juga menerapkan sikap nonkooperatif dengan menolak bekerja sama dengan lembaga bentukan pemerintah kolonial seperti Volksraad dan lebih memilih perjuangan politik secara langsung demi mencapai kemerdekaan penuh bagi Indonesia (Rasyid dkk., 2025).

2) Ki Hadjar Dewantara,

Ki Hajar Dewantara atau Soewardi Suryaningrat merupakan salah satu tokoh penting dalam Indische Partij yang memiliki pemikiran nasionalis, antikolonial, dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pemikirannya berkembang melalui aktivitasnya sebagai jurnalis, penulis, dan aktivis politik. Melalui tulisan-tulisannya di berbagai surat kabar seperti De Express dan Oetoesan Hindia, Soewardi menyampaikan kritik tajam terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Ia menggunakan bahasa yang komunikatif, berani, tetapi tetap halus dan penuh sindiran sehingga mampu membangkitkan kesadaran rakyat pribumi tentang pentingnya persatuan, harga diri bangsa, dan kemerdekaan (Utomo, 2014).

Dalam Indische Partij, Soewardi bersama Ernest Douwes Dekker dan Tjipto Mangoenkoesoemo yang dikenal sebagai "Tiga Serangkai" memiliki gagasan bahwa rakyat Hindia Belanda harus bersatu tanpa membedakan suku dan keturunan untuk melawan penjajahan. Indische Partij berdiri pada tahun 1912 dengan tujuan memperjuangkan pemerintahan sendiri dan Indonesia yang merdeka. Pemikiran Soewardi dalam organisasi ini sangat revolusioner karena ia menolak percaya kolonial dan menuntut hak kebebasan bagi bangsa pribumi. Ia juga menanamkan semangat bahwa rakyat Indonesia tidak boleh terus hidup sebagai bangsa yang tertindas dan harus berani memperjuangkan kemerdekaannya (Fahmi dkk., 2025).

Puncak dari pemikiran politik Soewardi terlihat dalam tulisannya yang terkenal berjudul "Als Ik Eens Nederlander Was" atau "Seandainya Aku Seorang Belanda" yang dimuat pada tahun 1913. Tulisan ini dibuat sebagai kritik terhadap rencana pemerintah Belanda yang ingin merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda di tanah jajahan Indonesia. Menurut Soewardi, sangat tidak adil jika bangsa Belanda merayakan kemerdekaannya di negeri yang rakyatnya masih berjajah. Dalam tulisannya, ia menyatakan bahwa jika ia seorang Belanda, ia tidak akan merayakan kemerdekaan di negeri yang masih dijajah sebelum memberikan kemerdekaan kepada rakyat yang ditindas. Ia juga menegaskan bahwa perayaan itu justru akan membangkitkan kesadaran rakyat pribumi untuk menuntut kemerdekaan seperti yang dimiliki bangsa Belanda (Wiryopranoto dkk., 2017: 90).

Melalui tulisan tersebut, Soewardi ingin menunjukkan bahwa bangsa Indonesia juga memiliki rasa cinta tanah air dan hak untuk merdeka. Ia berusaha menyadarkan rakyat pribumi bahwa penjajahan merupakan bentuk ketidakadilan yang harus dilawan. Pemikiran Soewardi juga

menekankan pentingnya keberanian, persatuan, dan kesadaran nasional. Dalam salah satu tulisannya, ia mengajak rakyat untuk melepaskan diri dari "perbudakan" dan memiliki kekuatan dalam menghadapi perjuangan nasional. Karena pemikiran dan kritiknya dianggap membahayakan pemerintah kolonial, Soewardi bersama dua tokoh Indische Partij lainnya akhirnya diasingkan ke Belanda oleh pemerintah Hindia Belanda (Suparlan, 2018).

3) Tjipto Mangoenkoesoemo

Tjipto Mangoenkoesoemo ialah salah satu individu yang sangat berpengaruh dalam sejarah perjuangan nasional di Indonesia, di mana ia dikenal karena pandangan politiknya yang tajam, radikal, serta revolusioner terhadap sistem kolonial yang diterapkan oleh Belanda. Pemikiran Tjipto banyak dipengaruhi oleh keadaan sosial dan politik di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, yang ditandai dengan ketidakadilan, diskriminasi, dan tindakan penindasan yang dialami oleh rakyat pribumi. Sejak masa muda, Tjipto telah menyaksikan perbedaan perlakuan yang jelas antara masyarakat Eropa dan pribumi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, hukum, dan status sosial. Selama menjalani pendidikan di STOVIA di Batavia, Tjipto menunjukkan ketidakpuasan terhadap peraturan-peraturan kolonial yang dianggap menghina martabat pribumi, seperti kewajiban mengenakan pakaian daerah yang menjadi penanda perbedaan status sosial dengan warga Eropa. Pengalaman tersebut membangun kepribadian Tjipto yang tegas, berani, serta memiliki semangat perlawanan terhadap kolonialisme dan feodalisme (Affandi & Sentono, 1979, hlm. 21–22).

Pemikiran Tjipto kemudian tumbuh melalui pengamatannya terhadap masyarakat Jawa yang tertekan akibat kekuasaan Barat dan penjajahan Belanda. Dalam esainya Moet de Javaan Geestelijk Immobiel Blijven? yang ditulis pada tahun 1911, Tjipto menguraikan bahwa masyarakat Jawa mengalami perubahan sosial yang signifikan, di mana mereka mulai kehilangan jati diri serta kebanggaan terhadap nilai-nilai lokal akibat pengaruh kolonial yang tidak henti-hentinya (Harahap, 2018, hlm. 15). Dari situasi tersebut, Tjipto menyadari bahwa penjajahan tidak hanya berpengaruh pada aspek ekonomi dan politik masyarakat, tetapi juga merusak mental dan identitas bangsa Indonesia. Pemikiran ini menjadi fondasi bagi munculnya kesadaran nasional dalam diri Tjipto untuk melawan penjajahan Belanda.

Selain itu, Tjipto juga mengecam sistem pendidikan dan politik kolonial yang dinilainya hanya berfungsi untuk memperkuat kekuasaan Belanda di wilayah Hindia Belanda. Dalam karyanya yang berjudul De Eenige Hechte Staatkunde yang ditulis pada tahun 1911, ia menguraikan bagaimana pemerintah kolonial memanfaatkan pendidikan untuk menanamkan loyalitas rakyat pribumi terhadap Belanda dan mempertahankan sistem penjajahan. Tjipto berpendapat bahwa tujuan pendidikan kolonial bukan untuk membebaskan masyarakat, melainkan untuk memfasilitasi eksploitasi wilayah koloni dan memastikan bahwa rakyat tetap patuh kepada pemerintah kolonial (Harahap, 2018, hlm. 17).

Berdasarkan pemikirannya itu, Tjipto mulai menganggap bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak bisa hanya dilakukan melalui pendidikan dan kegiatan sosial semata, tetapi harus diarahkan ke dalam perjuangan politik untuk mencapai kemerdekaan nasional.

Pandangan anti kolonial Tjipto semakin tajam setelah menyaksikan adanya diskriminasi rasial serta segregasi sosial yang dilakukan oleh pemerintah Belanda terhadap masyarakat di Hindia Belanda. Dalam tulisannya yang berjudul De Zich Verzwakkende Positie van den Prijaji pada tahun 1913, Tjipto menguraikan bahwa pemerintah kolonial menciptakan perbedaan perlakuan dalam hukum dan sosial antara orang Eropa, pribumi, dan kelompok lainnya. Ia menganggap bahwa sistem kolonial telah menyebabkan ketidakadilan dan menempatkan

masyarakat pribumi dalam posisi yang terpinggirkan. Tjipto juga mengecam kebijakan kolonial yang dengan sengaja memecah belah hubungan antar kelompok masyarakat demi mempertahankan kekuasaan Belanda (Harahap, 2018, hlm. 27). Tjipto menyatakan bahwa penyebab utama keterbelakangan rakyat Indonesia bukan hanya karena kurangnya pendidikan atau keterampilan masyarakat, tetapi lebih disebabkan oleh sistem penjajahan dan feodalisme yang menindas serta membatasi kebebasan dan peluang hidup mereka.

Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa rakyat Indonesia membutuhkan "terapi kemerdekaan" untuk mengatasi penderitaan akibat penjajahan Belanda (Affandi & Sentono, 1979, hlm. 23).Pemikiran nasionalisme Tjipto semakin berkembang ketika ia aktif dalam dunia jurnalistik dan organisasi politik. Ia memanfaatkan pers sebagai alat perjuangan untuk membangkitkan kesadaran nasional rakyat Indonesia melalui berbagai tulisan yang dimuat di Het Tijdschrift, De Expres, dan surat kabar lainnya. Bersama Ernest Douwes Dekker dan Ki Hadjar Dewantara, Tjipto mendirikan Indische Partij pada tahun 1912 sebagai organisasi politik yang bertujuan menyatukan seluruh rakyat Hindia Belanda tanpa membedakan suku, agama, ataupun keturunan dalam satu perjuangan nasional. Indische Partij dianggap sebagai partai politik nasional pertama di Indonesia karena secara terbuka memperjuangkan kemerdekaan dan persamaan hak bagi seluruh rakyat (Affandi & Sentono, 1979, hlm. 24). Dalam tulisannya Wegen tahun 1913, Tjipto menggambarkan keprihatinannya terhadap penjajahan Belanda dan mulai membayangkan datangnya masa kemerdekaan bagi rakyat Hindia Belanda. Ia menegaskan bahwa rakyat harus memiliki kesadaran untuk memperjuangkan kebebasan dan tidak terus hidup di bawah dominasi bangsa asing (Harahap, 2018, hlm. 29).

Sikap menentang kolonial yang ditunjukkan oleh Tjipto juga muncul ketika ia memutuskan untuk meninggalkan posisinya sebagai pegawai negeri setelah pihak kolonial memberikan tekanan untuk menghentikan artikel-artikel kritisnya di surat kabar De Locomotief. Bagi Tjipto, kebebasan berpendapat dan berpikir jauh lebih bernilai ketimbang posisi atau jabatan yang ditawarkan oleh pemerintah kolonial (Affandi & Sentono, 1979, hlm. 22–23).

Salah satu ekspresi perlawanan yang paling dikenal adalah saat ia bersama Komite Bumiputera menolak rencana pemerintah Belanda yang ingin merayakan hari kemerdekaan Belanda pada tahun 1913 dengan menggunakan uang dari rakyat yang dijajah. Menurut Tjipto, tindakan ini merupakan satu bentuk penghinaan bagi bangsa Indonesia yang masih hidup di bawah kekuasaan kolonial (Affandi & Sentono, 1979, hlm. 24–25). Akibat aktivitas politik dan tulisan-tulisannya yang dianggap membahayakan, Tjipto beserta beberapa tokoh Tiga Serangkai lainnya akhirnya ditangkap dan dibuang ke Belanda oleh pemerintah kolonial.

Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Politik Tiga Serangkai

a. Persamaan Pemikiran Politik Tiga Serangkai

1) Anti Kolonialisme dan Tuntutan Kemerdekaan Penuh

Kesamaan yang paling mendasar dari ketiga tokoh ini adalah penolakan tegas terhadap sistem kolonial Belanda dan cita cita kemerdekaan. IP merupakan satu satunya organisasi pada masanya yang memprogramkan secara eksplisit kemerdekaan penuh Hindia. Hal ini ditegaskan Douwes Dekker saat pendirian IP sebagai "penantangan perang dari pihak budak koloni yang membayar pajak kepada kerajaan penjajah, pemungut pajak".

Nasionalisme IP, meminjam istilah Anthony Reid, adalah nasionalisme anti imperial sebuah nasionalisme yang didasari pada solidaritas bersama atas penindasan dari kolonialisme. Ini berbeda dari nasionalisme Boedi Oetomo yang lebih bersifat nasionalisme etnis kultural, dan dari Sarekat Islam yang berbasis perlawanan ekonomi (Utomo, 2014). IP adalah fase ketiga dalam

perkembangan Pergerakan Nasional: setelah kebangkitan intelektual (Budi Utomo) dan kebangkitan kerakyatan berjiwa Islam (Sarekat Islam), lahir konsepsi politik seratus persen dengan program nasional modern.

2) Nasionalisme Inklusif Lintas Etnis

Ketiganya sepakat bahwa bangsa Hindia tidak didefinisikan berdasarkan garis etnis, ras, atau agama. IP terbuka bagi semua orang yang menjadikan Hindia sebagai tanah air dan kebangsaannya, tanpa memandang apakah ia keturunan bumiputra, Belanda, Cina, Arab, atau lainnya. Paham ini dikenal sebagai Indisch Nationalisme, yang kemudian hari melalui Perhimpunan Indonesia dan PNI berkembang menjadi Indonesisch Nationalisme atau Nasionalisme Indonesia (Poesponegoro & Notosusanto, 2019: 351).

Konsepsi ini melampaui pemikiran politik zamannya. Elson menilai IP "jauh lebih penting bagi gagasan Indonesia ketimbang BO dan SI" karena merupakan upaya "satu jiwa yang romantis dan hidup". Hal ini juga sejalan dengan penilaian bahwa Indische Partij memiliki keunggulan berupa visi nasionalisme yang radikal dan modern tidak hanya ingin reformasi, tetapi ingin merdeka total (Rasyid dkk., 2025).

3) Penolakan Supremasi Ras dan Keistimewaan Golongan

Ketiga tokoh sepakat bahwa supremasi ras harus diberantas, baik dalam bidang ketatanegaraan maupun kemasyarakatan. Hal ini tertuang secara resmi dalam Anggaran Dasar IP pasal (b): "memberantas rasa kesombongan rasial dan keistimewaan ras baik dalam bidang ketatanegaraan maupun dalam bidang kemasyarakatan" (Poesponegoro & Notosusanto, 2019: 351). Bahkan menurut Soewardi, Douwes Dekker tidak mengenal supremasi Indo atas penduduk bumiputra, dan malah menghendaki hilangnya golongan Indo dengan jalan peleburan ke dalam masyarakat bumiputra.

4) Penggunaan Media dan Propaganda Politik Terbuka

Tiga Serangkai memakai media cetak terutama majalah Het Tijdschrift, kemudian De Expres dan Oetoesan Hindia sebagai instrumen penyebaran gagasan nasionalisme. Untuk persiapan pendirian IP, Douwes Dekker mengadakan perjalanan propaganda keliling Jawa mulai 15 September hingga 3 Oktober 1912. Dalam tur inilah ia bertemu Tjipto Mangunkusumo, mendapat dukungan Soewardi Suryaningrat di Bandung, serta mendapat sambutan dari pengurus Budi Utomo di Yogyakarta. Hasilnya nyata: 30 cabang berdiri dengan 7.300 anggota (Poesponegoro & Notosusanto, 2019: 350-353).

5) Memori Kejayaan Masa Lalu sebagai Landasan Identitas

Para pemikir IP mempunyai kesamaan dalam melihat bangsa dalam relasinya dengan glorious past. Dekker memandang Hindia sebagai tanah yang dahulu makmur, bebas, dan damai sebelum kolonialisme merampas semuanya. Sementara Tjipto menyatakan bahwa sudah menjadi "tugas suci untuk mengembalikan bangsa kita yang tengah terpuruk, dan kalau mungkin mendirikan kembali Kerajaan Hindia yang merdeka, versi baru dari Kerajaan Majapahit, tapi tanpa dipimpin oleh satu orang atau keluarga". Inilah yang oleh Anthony Smith disebut fungsi "arkeolog politik" para nasionalis merediskoveri dan mengkonstruksi kembali sejarah demi komunitas (Utomo, 2014: 66).

b. Perbedaan Pemikiran Politik Tiga Serangkai

1) Douwes Dekker: Nasionalisme Radikal Sekuler yang Berbasis pada Kesetaraan Universal

Dekker adalah sosok penggerak utama dengan pandangan yang paling ekstrem. Latar belakangnya sebagai seorang Indo yang mengalami diskriminasi antara keturunan Belanda tulen dan orang Indo menjadi titik awal pemikirannya (Poesponegoro & Notosusanto, 2019: 350).

Namun, ia melangkah lebih jauh dari sekadar membela kepentingan kelompok Indo: ia memperluas perspektifnya untuk seluruh masyarakat Indonesia yang hidup di bawah kondisi kolonial.

Ia berpendapat bahwa persatuan masyarakat tidak akan bermakna selama ada stratifikasi ras, budaya, dan moralitas agama. Ia membayangkan kesetaraan sekuler yang universal, di mana Austria Hongaria, Swiss, dan Amerika Serikat menjadi contoh bahwa "beragam perbedaan dapat hidup dalam satu kesatuan negara yang lebih tinggi". Dekker merumuskan ide mengenai bangsa bukan berdasarkan solidaritas etnis atau ras, tetapi "karena perasaan kesamaan pengalaman dan solidaritas khusus yang muncul dari hal tersebut" (Elson dalam Utomo, 2014).

Menurut kritik Sneevliet, kelemahan Dekker adalah bahwa ia memimpin gerakan politik tanpa teori yang terstruktur, ide-ide yang diusungnya tendensinya samar, dan lebih menekankan pada praktik daripada ideologi (Schwidder dalam Utomo, 2014). Ia lebih efektif sebagai penggerak massa dibandingkan sebagai pemikir ideologis. Namun, pengaruh propagandanya terbukti sangat kuat: seorang temannya mengungkapkan bahwa aksi Dekker berkeliling Jawa "seperti badai yang meninggalkan emosi yang mencengangkan di setiap kota, yang tidak pernah terjadi sebelumnya" (Poesponegoro & Notosusanto, 2019: 350).

2) Tjiptomangoenkusumo: Radikalisme Evolusioner dan Sintesis Barat Timur

Berbeda dari Dekker yang menginginkan pemutusan total dari Belanda, Tjipto memiliki pandangan yang lebih evolusioner. Meskipun sama sama menentang kolonialisme, Tjipto masih menganggap bahwa persatuan antara kaum pribumi dengan Belanda dapat membawa kemajuan dan modernisasi. Dalam artikelnya *Eenheid* (Persatuan), ia menekankan "persatuan masyarakat Hindia Timur" yakni penggabungan unsur unsur Barat dan Timur sebagai faktor penting dalam menjamin pertumbuhan subur bagi negara dan rakyatnya (Scherer dalam Utomo, 2014).

Menurut Tjipto, persatuan tidak mesti memerlukan keseragaman sebagai prasyarat. Yang diperlukan adalah saling menghormati dan mengerti antara pribumi dan Eropa. Dengan sudut pandang evolusioner ini, negara Hindia baginya ibarat penyampingan budaya budaya dari berbagai suku yang kemudian membentuk satu kesatuan politik seperti yang dialami orang Friesen menjadi bagian dari negara Belanda, atau orang Bayern yang diterima sebagai warga negara Jerman (Elson dalam Utomo, 2014). Gagasan keseimbangan ini dianggap pemerintah kolonial sebagai gagasan revolusioner radikal yang merendahkan keunggulan Belanda, dan dianggap berbahaya.

Tjipto bergabung dengan IP di Surabaya bersama sekitar 70 orang lainnya, datang jauh jauh dari Malang menemui Dekker karena melihat kesamaan visi politiknya. Ia juga dikenal karena penolakannya yang keras terhadap tradisi feodal aristokrasi Jawa. Tatacara sembah sujud, misalnya, ia nilai sebagai tradisi yang merendahkan martabat orang Jawa, dan ia beberapa kali sengaja melanggar hak hak eksklusif kaum bangsawan sebagai bentuk protes simbolik (Utomo, 2014).

3) Soewardi Suryaningrat: Kesadaran Nasional Melalui Kritik Budaya dan Jurnalisme

Soewardi menyuguhkan dimensi budaya sastra yang unik. Pemikirannya muncul secara paling jelas dalam tulisan Als ik een Nederlander was ("Seandainya Saya Seorang Belanda"), yang dipublikasikan di surat kabar De Expres dan diakui sebagai "tulisan pertama oleh seorang intelektual Indonesia yang secara tegas mengkritik pemerintah kolonial". Artikel ini ditulis dalam konteks pembentukan "Komite Bumiputra" di Bandung, yang bertujuan mengirimkan telegram kepada Ratu Belanda berisi permintaan penghapusan Pasal III R. R., pembentukan lembaga perwakilan rakyat, serta kebebasan berekspresi (Poesponegoro & Notosusanto, 2019: 350).

Dalam tulisannya, Soewardi mempertanyakan alasan merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda di daerah yang penduduknya masih terjajah. Tulisan ini kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu dan disebarluaskan secara luas, sehingga bisa diakses oleh orang-orang yang tidak memahami Bahasa Belanda (Scherer dalam Utomo, 2014). Dampaknya sangat signifikan: pemerintah kolonial menganggapnya berbahaya bukan hanya karena nada yang provokatif, tetapi juga karena dampak politik yang dapat ditimbulkannya. Menariknya, meskipun Soewardi berasal dari keluarga bangsawan (anak Pangeran Suryaningrat, anak pertama Pakualam III), ia memilih untuk sepenuhnya mendukung rakyat. Sikap ini membuat kalangan priyayi Jawa terheran-heran, sementara pemerintah Belanda menganggapnya lebih membahayakan dibandingkan Tjipto yang berasal dari kalangan priyayi yang lebih rendah (Utomo, 2014).

KESIMPULAN

Pemikiran politik Tiga Serangkai memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan kesadaran nasional Indonesia pada awal abad ke-20. Melalui organisasi Indische Partij, Ernest Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Tjipto Mangoenkoesoemo menanamkan gagasan nasionalisme modern yang menekankan persatuan seluruh rakyat Hindia Belanda tanpa membedakan suku, ras, dan golongan. Semboyan "Indië voor Indiërs" atau "Hindia untuk orang Hindia" menjadi dasar lahirnya kesadaran bahwa bangsa Indonesia memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan terbebas dari kolonialisme Belanda. Selain itu, kritik tajam terhadap diskriminasi kolonial melalui tulisan-tulisan politik, terutama karya Ki Hajar Dewantara *Als Ik Een Nederlander Was*, berhasil membangkitkan semangat antikolonialisme dan kesadaran politik rakyat bumiputra. Pemikiran Tiga Serangkai juga mendorong lahirnya persatuan nasional, berkembangnya organisasi pergerakan modern, serta tumbuhnya kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai sarana perjuangan bangsa menuju kemerdekaan Indonesia (Wiryopranoto, 2017: 27–30).

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, A. B., & Sentono, D. (1979). *Tiga serangkai*. Dinas Museum dan Sejarah Pemerintah DKI Jakarta.

Fahmi, R. F. M., Nurpadilah, S. L., Sudrajat, S. R., & Syamsi, R. N. (2025). Propaganda intelektual Indische Partij: Strategi media dan pendidikan dalam membangkitkan kesadaran nasional (1912–1925). *KRONIK: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Historiografi, 9*(1), 1–18.

Firmansyah, A. B. (2013). Perjuangan Ernest Francois Eugene Douwes Dekker dari politik menuju pendidikan 1913–1941. *AVATARA: e-Journal Pendidikan Sejarah, 1*(1), 57–68.

Harahap, S. (2018). *Bibliografi beranotasi karya Tjipto Mangoenkoesoemo*. Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Herlina, Nina. (2020). *Metode Sejarah*. Edisi Revisi 2020. Bandung: Satya Historika, hlm. 26–27.

Latief, Y. (2012). *Inteligensia Muslim dan kuasa*. Democracy Project.

Nurhayati, Apriyanto, Ahsan, J., & Hidayah, N. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.hlm 24-30

Nurhasanah, Dkk. (2025). Sejarah berdirinya Indische Partij (Partai Hindia) pada tahun 1912. *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia, 2*(3), 4623–4633.

Pamungkas, J. (2025). Politik etis dan perubahan sosial: Pendidikan dan pembangunan sebagai instrumen kolonialisme dan penindasan rakyat Hindia Belanda. *[Nama Jurnal, Volume*(Nomor), Halaman].

Perdana, Y., & Pratama, R. A. (2022). *Sejarah pergerakan nasional Indonesia*. Penerbit Lakeisha.

Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2019). *Sejarah nasional Indonesia V: Zaman kebangkitan nasional dan masa Republik Indonesia (1900–1942)*. Balai Pustaka.

Rasyid, S., Nurhaolillah., Syahril., & Fahmi, M. (2025). Tiga pelopor bangkitnya nasionalisme di awal pergerakan Indonesia: Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij. *CARITA: Jurnal Sejarah dan Budaya, 3*(2), 124–143.

Samingan, S. (2017). Nasionalisme kulit putih: Ernest Douwes Dekker malaikat pemberani. *Ekspektasi: Jurnal Pendidikan Ekonomi, 2*(2), 78–90.

Suparlan, S. (2018). Pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan. *Jurnal Fondatia, 2*(1), 71–86.

Utomo, W. S. (2014). Nasionalisme dan gagasan kebangsaan Indonesia awal: Pemikiran Soewardi Suryaningrat, Tjiptomangoenkusumo dan Douwes Dekker 1912–1914. *Lembaran Sejarah, 11*(1), 51–69.

Wiryopranoto, S., & Herlina, N. (2017). *Ki Hajar Dewantara: Pemikiran dan perjuangannya*. Museum Kebangkitan Nasional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudaya